BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kualitas kerja lembaga aparatur Negara sebagai abdi masyarakat harus selalu diupayakan untuk terus ditingkan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.Kualitas kerja merupakan kesesuaian antara hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan, sebagai totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Kualitas kerja dan nilai hasil kerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Bandung dapat dilihat dari aspek penampilan, kehandalan, kekuatan, serta daya seni.

Untuk mengetahui kualitas Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penertiban parkir dan melakukan observasi lapangan untuk memperoleh informasi tentang kualitas kerja aparatur dari aspek penampilan, kehandalan, kekuatan, serta daya seni.

Kualitas kerja merupakan dimensi pertama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam kualitas kerja terdapat empat aspek yang dapat mengukur dimensi kualitas kerja. Aspek tersebut antara lain adalah aspek Penampilan, kehandalan, kekuatan dan daya seni. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa secara aspek penampilan, kualitas kinerja masih belum dapat terpenuhi dengan baik hal tersebut ditunjukan oleh masih belum lengkapnya seragam dan atribut yang dipakai oleh aparatur Dinas Sosial dan juga sarana, prasarana, fasilitas dan alat yang masih belum memadai. Dimensi kualitas kerja berdasarkan aspek kehandalan masih belum terpenuhi dengan baik, hal tersebut ditunjukan oleh belum maksimalnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aspek kekuatan dimensi kualitas kerja belum dapat terpenuhi secara maksimal karena dalam pelaksanaan pembinaan masih ada beberapa anak jalanan yang belum merasakan program pembinaan dari Dinas Sosial tersebut.

Kualitas dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Bandung tentang membina anak jalanan masih bisa dikatakan belum berjalan secara optimal dilihat dari beberapa aspek yang belum tercapai. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.1.1. Penampilan Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Penampilan merupakan salah satu indikator dalam aspek kualitas kerja. Tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dari segi visual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Penampilan yang baik akan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Dimensi penampilan juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan konsumen, karena dengan penampilan yang baik, maka harapan,

kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap aparatur akan meningkat, maka sangat penting bagi Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung untuk memperhatikan aspek penampilan, baik itu penampilan fisik aparatur, maupun penampilan dari sarana dan prasarana, alat serta bahan untuk pelaksanaan operasional.

Penampilan fisik aparatur Dinas Sosial dapat dilihat dari kelengkapan seragam yang dikenakan. Aparatur tim penanganan rawan sosial diwajibkan menggunakan seragam, hal tersebut dilakukan sebagai identitas aparatur dilapangan dan untuk menghindari oknum yang dapat mengelabui.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti melihat semua aparatur sudah memakai seragam yang sebagaimana dianjurkan, tetapi masih ada sebagian yang atributnya belum lengkap. Tidak lengkapnya atribut yang digunakan oleh aparatur ini bisa menghilangkan rasa kepercayaan para anak jalanan dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Mengenai ketersediaan fasilitas Dinas Sosial untuk membina anak jalanan menjelaskan bahwa fasilitas yang diperlukan adalah berupa peralatan keterampilan,

ruang untuk kegiatan pembinaan, dan fasilitas penunjang kegiatan seperti alat tulis, alat musik, ruang istirahat/rumah singgah. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kendaraan operasional yaitu 2 unit truk, 2 unit truk penertiban dan 2 unit mobil patroli.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa ketersediaan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana juga alat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti misalnya berdasarkan data dari Dinas Sosial, ketersediaan mobil aparatur penertiban adalah sebanyak 4 unit, namun dalam observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa mobil aparatur hanya ada dua unit, lalu tidak memiliki ruang atau tempat untuk membina anak jalanan itu sendiri.

Pemeliharaan fasilitaspun nampak belum maksimal dilakukan sesuai ketentuan, hal tersebut dapat dilihat dari penampilan beberapa fasilitas yang terlihat kurang maksimal. Mengenai fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung kondisi kendaraan operasional kurang dirawat dengan baik, satu dari dua truk penertiban kondisinya belum bisa di operasionalkan, kemudian terdapat beberapa ruang kosong yang tidak terawat yang semestinya bisa dimaksimalkan dengan baik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penampilan merupakan salah satu aspek penting dalam kualitas kerja, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa secara aspek penampilan, apartur Dinas Sosial sudah dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dikarenakan semua aparatur memakai seragam dan atribut yang

ditentukan. Hanya saja ada beberapa yang masih belum memakai atribut lengkap, mungkin dikarenakan seragamnya kotor atau rusak.

4.1.2. Kehandalan Aparatur Dinas Sosial Pada Saat Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kehandalan merupakan kemampuan yang diharapkan dapat diandalkan dalam menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung jawab dan akurat kepada masyarakat. Kehandalan apartur Dinas Sosial Kota Bandung dalam membina anak jalanan merupakan salah satu komitmen Dinas Sosial dalam rangka menciptakan Kota Bandung yang Tertib, Aman, Nyaman, dan Bermartabat.

Kehandalan merupakan aplikasi dari sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat. Kehandalan dapat diukur secara konsepsional dan operasional untuk memberikan hasil yang maksimal dalam rangka membina anak jalanan di Kota Bandung. Aspek yang menjadi ukuran dari kehandalan tersebut meliputi kinerja, kemampuan, kekuatan, kesanggupan dalam membina anak jalanan di Kota Bandung.

Kualitas kerja aparatur Dinas Sosial dapat diukur salah satunya oleh aspek kehandalan aparatur Dinas Sosial dalam membina anak jalanan. Untuk mengetahui kehandalan aparatur Dinas Sosial dalam membina anak jalanan peneliti melakukan wawancara kepada Aparatur Dinas Sosial dan Pengurus RPA (Rumah Perlindungan Anak).

Dalam rangka membina anak jalanan dilakukan beberapa tahapan kegiatan, tahapan kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan Razia yang dilakukan oleh tim Penanganan PMKS sebagai bagian dari Dinas Sosial Kota Bandung, sampai penyediaan sarana dan prasarana bagi anak jalanan yang terjaring razia.

Pelaksanaan membina anak jalanan dilakukan dua sampai tiga kali dalam setahun, bagaimana anggaran dana itu sendiri sudah siap atau belum, karena menurut hasil wawancara peneliti dengan aparatur Dinas Sosial sendiri menyebutkan bahwa Dinas Sosial tidak mempunyai agenda rutin untuk menjalankan program pembinaan anak jalanan tersebut. Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan pembinaan anak jalanan bekerja sama dengan pihak RPA, jumlah anak jalanan yang ikut serta dalam program pembinaan paling banyak sampai 150 anak jalanan.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa sebagai upaya membina anak jalanan Dinas Sosial melakukan kegiatan pembinaan. Rangkaian kegiatan pembinaan tersebut antara lain dilakukan razia terlebih dahulu oleh pihak Dinas Sosial dibantu dengan Satuan Poilisi Pamong Praja, kemudian dikumpulkan di Dinas Sosial untuk pendataan dan diberi arahan, selanjutnya diserahkan kepada orang tua masing-masing bagi yang masih mempunyai dan ada yang diserahkan kepada RPA. Selanjutnya Dinas Sosial menyusun acara untuk program pembinaan kemudian setelah waktunya tiba Dinas Sosial akan memberi kabar kepada RPA yang ada di Bandung untuk mengikut sertakan anak jalanan yang ada di RPA tersebut ikut program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh Dinas Sosial membina anak jalanan dengan memberikan pelatihan

keterampilan, pelatihan seni musik, memberikan pelayanan kesehatan, dan sekolah kejar paket A, B, C. Sekolah kejar paket ini Dinas Sosial bekerjasama dengan LSM dan RPA di Kota Bandung.

Membina anak jalanan juga harus ditunjang oleh kehandalan aparatur Dinas Sosial dalam menangani para anak jalanan. Kehandalan aparatur dalam membina anak jalanan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan juga fasilitas yang memadai sehingga kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Kehandalan aparatur juru parkir yang masih kurang dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memilih memarkirkan kendaraannya di tempat parkir liar. Masyarakat berpendapat bahwa tidak ada bedanya memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi dan di tempat parkir liar, karena juru parkir resmi tidak dapat membantu banyak ketika masyarakat akan memarkirkan kendaraan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa aparatur tim ploting yang seharusnya bertugas di kawasan larang parkir dan kawasan parkir resmiuntuk mengawasi pengelolaan parkir dari pagi hingga sore, tidak selalu berada di tempat tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tim hunting pun hanya berkeliling sekali saja, padahal seharusnya aparatur berkeliling selama dua jam sekali dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kemudian dari pengamatan yang dilakukan di tempat parkir resmi, peneliti melihat bahwa aparatur juru parkir kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya.dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

secara aspek kehandalan, apartur Dinas Sosial belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dengan baik.

4.1.3. Kekuatan Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kekuatan merupakan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kekuatan yang harus dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial adalah kesigapan, dan ketegasan dalam membina anak jalanan sedangkan kekuatan yang harus dimiliki adalah kesigapan dalam menjalankan program pembinaan, dan juga memberikan keamanan serta kenyamanan kepada para nak jalanan yang mengikuti pembinaan. Dalam membina anak jalanan para aparatur dituntut tidak pandang bulu dalam menertibkan anak dari jalanan, dan memberikan arahan serta pendidikan kepada para anak jalanan.

Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk menciptakan sebuah kinerja organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana berupa pemberian informasi kepada masyarakat pada saat pembinaan sehingga tercipta sebuah bentuk pelayanan yang maksimal. Pengembangan sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota Bandung diarahkan kepada kinerja yang maksimal pada saat membina anak jalanan berupa pemberian pendidikan yang setara.

Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung yang tergabung, semua berkoordinasi dan bekerjasama untuk meningkatkan pembinaan yang diberikan Dinas Sosial Kota

Bandung kepada para anak jalanan. Selain itu dibentuk tim dalam rangka meningkatkan mutu kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, mengingat banyaknya jumlah anak yang ada untuk mengikuti pembinaan, tidak mungkin bahwa aparatur harus ditangani oleh satu sub-bagian yang ada di struktural Dinas Sosial Kota Bandung saja.

Kekuatan fisik aparatur dalam sebuah pelaksanaan kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting, sebenarnya tidak ada ketetapan yang mengartur soal kekuatan fisik aparatur, akan tetapi ketika bertugas aparatur harus dipastikan berada dalam keadaan sehat.

Gambar 4.1

Kegiatan Penjaringan oleh Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial 2014

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan terdapat beberapa anak jalanan yang masih ada di jalanan, padahal di perempatan jalan tersebut terdapat pos polisi dan ada polisi yang berjaga. Kondisi tersebut kontras dengan ketentuan yang berlaku yang mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan di seluruh Kota Bandung.

4.1.4. Daya Seni Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung Ketika Membina Anak Jalanan

Daya seni merupakan salah satu aspek dalam kualitas pelayanan yang tidak bisa diabaikan. Daya seni merupakan sisi estetika di dalam pekerjaan. Dalam hal membina, daya seni dapat diartikan sebagai cara aparatur dalam membina anak jalanan dengan memperhatikan segi kerapihan dan keindahan dalam mengatur kegiatan pembinaan yang akan diberikan. Sehingga bisa mencapai sasaran dalam menjalankan program pembinaannya.

Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang dilakukan oleh aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pembinaan kepada para anak jalanan. Program pelatihan sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi atas kurangnya tingkat kreatifitas aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung.

Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan seorang aparatur untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Seorang aparatur yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dengan pelatihan-pelatihan kerja pasti mempunyai kemampuan yang baik dalam bekerja, sehingga dengan hasil kerja yang baik mereka akan mecapai prestasi kerja yang diinginkan. Hambatan pemberian pelatihan dari pemerintah Kota Bandnug kepada aparatur Dinas Sosial Kota Bandung tentang pembinaan anak jalanan antara lain waktu yang terbatas, terlalu banyak pekerjaan dan sibuk, malas dan tenaga aparatur terbatas.

Program yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan aparatur tidak hanya berbentuk pengetahuan tentang teknologi tetapi program yang menyangkut sikap seorang aparatur sangat diperlukan, salah satu pelatihan sikap yang harus dilaksanakan yaitu disiplin kerja aparatur karena disiplin kerja seseorang dapat mempengaruhi terhadap kinerjanya apabila aparatur tersebut memiliki tingkat kedisiplinan yang baik maka kinerja yang dihasilkannya akan baik.

Kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, khususnya aparatur bagian Rehabilitasi Sosial, harus memiliki motivasi yang baik. Motivasi tersebut bertujuan mendorong aparatur untuk meningkatkan semangat bekerja dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. Kinerja seorang aparatur tidak hanya bisa dilihat dari tingkat kemampuan saja, kinerja yang baik harus dinilai dari seberapa besar motivasi kerjanya seperti keinginan untuk bekerja sehingga meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan pembinaan oleh Dinas Sosial dilakukan disaat dana anggaran sudah ada atau terkumpul. Aparatur Dinas Sosial mendapatkan hambatan saat memberikan pembinaan karena kurangnya *skill* dan daya seni saat mendekati anak jalanan, anak-anak kebanyakan merasa takut dan tidak mau menuruti apa yang dikatan oleh aparatur karena tidak adanya daya seni dari aparatur Dinas Sosial dan cenderung kaku.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, peneliti melihat bahwa setelah penjaringan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial beserta Satpol PP

Kota Bandung anak jalanan di data dan diberikan arahan oleh pihak Dinas Sosial. Kurangnya fasilitas seperti tempat pembinaan menyulitkan aparatur Dinas Sosial memberikan pelayanan yang baik.

Pengamatan peneliti didukung oleh pernyataan dari aparatur Dinas Sosial yang berpendapat bahwa Dinas Sosial Kota Bandung tidak mempunyai tempat untuk melakukan kegiatan pembinaan untuk anak jalanan serta kekurangan sumber daya manusia. penempatan posisi para PMKS yang sedang diberi arahan di halaman Dinas Sosial Kota Bandung terlihat kurang baik dan kurang teratur. Dari hasil observasi dan pengamatan tersebut maka diketahui bahwa daya seni aparatur dalam penertiban dan pembinaan anak jalanan masih belum mencapai hasil yang optimal.

4.2. Ketepatan Waktu Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Waktu adalah faktor yang paling berharga dalam melakukan pekerjaan.Waktu yang diperlukan Dinas Sosial adalah waktu yang digunakan dalam kegiatan membina anak jalanan. Ketepatan waktu adalah ketepatan pelaksanaan jadwal kerja dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu kerja merupakan lama pelaksanaan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan. Indikator dari waktu kerja yaitu jadwal kerja dan lama penyelesaian.

Ketepatan waktu dalam membina anak jalanan, sehingga program pembinaan bisa dilaksanankan dengan efektif dan efisien. Indikator yang harus diperhatikan

dalam waktu tersebut yaitu jadwal, iklim, lama, serta batas waktu dalam membina anak jalanan di Kota Bandung.

Untuk mengetahui aspek–aspek dalam ketepatan waktu Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan juga melakukan observasi lapangan untuk mengetahui yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Ketepatan Waktu merupakan salah satu dimensi penting dalam mengukur baik atau tidaknya kinerja. Dimensi ketepatan waktu memiliki tiga aspek penting yang dapat dijadikan pengukuran. Aspek tersebut anatara lain adalah jadwal kerja dan lama penyelesaian. Aspek jadwal kerja dan aspek penyelesaian pekerjaan masih belum dapat dikatakan baik karena terdapat ketidak sesuaian antara waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam jadwal kerja dengan praktek dan pelaksanaan dilapangan. Ketepatan waktu dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Kota Bandung masih belum optimal untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1. Jadwal Kerja Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Jadwal kerja merupakan salah satu aspek dalam dimensi ketepatan waktu yang harus dipenuhi karena dengan adanya jadwal kerja yang efektif dan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan akan sangat berpengaruh pada hasil kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan aparatur Dinas Sosial diperoleh keterangan bahwa dalam membina anak jalanan terdapat pembagian waktu untuk para aparatur. Pembagian waktu tersebut meliputi penertiban, sosialisasi, dan pembinaan anak jalanan.

Aparatur Dinas Sosial pertama-tama melakukan penertiban terhadap PMKS di Kota Bandung terlebih dahulu yang dilakukan bersama dengan Satpol PP. Operasi ini dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Target operasi biasanya dilakukan acak keseluruh jalanan di Kota Bandung. Selama melakukan penertiban terdapat hambatan karena beberapa PMKS melakukan perlawanan dan penolakan ketika di tertibkan.

Adapun setelah melaksanakan penertiban, Dinas Sosial kemudian memberikan sosialisasi kepada anak jalanan dan para penyandang masalah kesehatan sosial, dalam sosialisasi para anak jalanan di data dan diberi arahan juga peringatan terhadap dampak apa yang akan mereka dapatkan jika hidup dijalanan. Jadwal kerja tim penertiban secara lebih rinci adalah Penertiban plotingdilaksanakan pada hari selasa-kamis-jumat shift pertama mulai dari jam 09,00 s/d 11.00 dan shif kedua mulai jam 11.00 s/d 13.00 (sosialisasi) dilanjut Shif ketiga mulai jam 13.00 s/d 15.00, Penertiban dilakukan *Huntting* secara *mobile*.

Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat juga dilakukan karena diperlukan untuk memberikan penerangan mengenai aturan baru yang akan keluar mengenai tidak bolehnya memberikan uang kepada para anak jalanan dan PMKS lainnya.

Sosialisasi tersebut dilakukan melalui media sosial seperti twitter, dan juga berkeliling melakukan mobil patroli.

Gambar 4.2

Kegiatan Pendataan Anak Jalanan di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung



Sumber: Hasil observasi peneliti tahun 2014

Berdasarakan dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa dalam kegiatan penertiban, keberadaan aparatur dilapangan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan, aparatur tidak ada di lapangan dari pagi sampai sore melainkan hanya beberapa jam saja. Kemudian mengenai kegitan hunting atau penertiban mobile, menurut jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut di mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 yang dilakukan secara bergantian oleh tim yang terdiri dari 4 shift, namun pada kenyataannya kegiatan penertiban mobile tersebut hanya dilakukan sebanyak satu kali saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bila dilihat dari aspek jadwal kerja, apartur Dinas Sosial belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi Ketepatan Waktu dengan baik.

4.2.2. Lama Waktu Penyelesaian Aparatur Dinas Sosial Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penundaan yang menyebabkan penumpukan volume pekerjaan dapat dihindari. Lama penyelesaian pekerjaan harus ditetapkan sehingga pegawai dapat mengetahui batas waktu penyelesaian pekerjaannya dan dapat membuat target.

Dinas Sosial memiliki ketentuan mengenai lama penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan membina anak jalanan, seperti yang dikatakan oleh aparatur Dinas Sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, lama penyelesaian pekerjaan setiap shift dalam tim penertiban PMKS adalah selama 2-4 jam sampai kemudian bergilir dengan shift berikutnya.

Adapun informasi mengenai kegiatan, tim yang membina anak jalanan di Dinas Sosial dilakukan oleh tiga aparatur yang terikat oleh bagian kerjanya dibantu dengan aparatur lainnya. Tim pembina anak jalanan mengatakan lama penyelesaian pembinaan terhadap anak jalanan sangat relative dan tidak dapat ditentukan karena hal tersebut tergantung pada berapa banyak anak yang dibina dan berapa banyak pihak yang membantu Dinas Sosial Kota Bandung serta kemudahan mendapatkan

dana untuk kegiatan pembinaan. Pembinaan ini akan terus dilakukan selama masih ada anak-anak jalanan di Kota Bandung.

Mengenai pelaksanaan ini aparatur menjelaskan bahwa pihaknya kesulitan untuk melaksakanakan pembinaan terhadap anak jalanan jika hanya mengandalkan Dinas Sosial Kota Bandung saja, karena Dinas Sosial kekurangan sumber daya manusia serta sarana prasarana. Maka dari itu Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan pihak RPA dan ibu-ibu PKK agar bisa mempercepat proses pembinaan.

Dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa lama penyelesaian pekerjaan aparatur penertiban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam jadwal telah tercantum dengan jelas bahwa lama kegiatan penertiban setiap shift adalah bergilirian setiap dua jam dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, namun pada kenyataannya sebelum waktu yang telah ditentukan, tim penertiban sudah menghentikan kegiataannya.

Peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa secara aspek lama penyelesaian membina anak jalanan, Dinas Sosial belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi ketepatan waktu.

4.3. Kemampuan Kerja Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kemampuan kerja merupakan kesanggupan aparatur untuk melakukan pekerjaan secara konsepsional dan teknik operasiaonal. Kemampuan kerja dapat ditandai dengan pengetahunan, sikap dan keterampilan. Kemampuan kerja sesuai keahliannya dengan indikator keahlian, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam membina anak jalanan di Kota Bandung.

Dimensi kemampuan kerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kinerja. Dimensi kemampuan kerja aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dapat diukur oleh aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Aspek pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan membina anak jalanan sudah cukup baik walaupun masih terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, aspek sikap masih belum terpenuhi dengan baik karena dilapangan masih ditemukan sikap aparatur yang kurang menyenangkan. Aspek keterampilan sudah cukup terpenuhi, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil dari aspek-aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kemampuan kerja sudah cenderung tercapai dengan baik walaupun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek sikap, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.3.1. Pengetahuan Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Pengetahuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi kemampuan kerja. Seorang pegawai atau aparatur harus memiliki pengetahuan yang luas khusunya yang berkenaan dengan pekerjaannya sehingga aparatur tersebut dapat benar-benar memahami pekerjaannya dan dapat melaksakan pekerjaannya dengan tepat.

Mengenai pengetahuan aparatur Dinas Sosial dalam membina anak jalanan, bahwa pengetahuan aparatur Dinas Sosial selalu berusaha dipupuk dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan.

Dalam membina anak jalanan, peran aparatur tidak dapat diabaikan. Untuk dapat membantu membina anak jalanan, aparatur harus memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan aturan dan tata cara membina yang baik dan benar. Membina dan mendidik anak yang baik dan benar. Dalam hal ini Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan pembinaan pada aparatur dilapangan agar dapat mengetahui dan memahami tugas-tugasnya dalam membantu membina anak jalanan, hal tersebut berkenaan dengan tata-tata cara dan aturan membina anak jalanan.

Sedangkan menurut aparatur dilapangan mengatakan bahwa pembinaan pernah dilakukan namun jarang, pengetahuan mengenai cara mendidik dan membina lebih banyak berdasarkan pengalaman langsung (Otodidak).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan membina anak jalanan aparatur tim Dinas Sosial terlihat sudah cukup memahami

pekerjaannya dan dilihat daritingkat pendidikan aparaturpun minimal adalah SMA. Tetapi ritme waktu tim sosialisasi dalam memberikan pembinaan berkala kepada aparatur Dinas Sosial masih kurang, itu terbukti dari aparatur yang lebih memahami cara membina anak dengan otodidak dan Hasil observasi mengenai pembinaan anak jalanan, peneliti melihat bahwa pengetahuan tim pembinaan Dinas Sosial dengan pihak RPA dalam membina anak jalanan sudah cukup baik walaupun masih terkendala oleh minimnya fasilitas, sarana dan prasarana.

4.3.2. Sikap Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Sikap merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi kemampuan kerja. Sikap merupakan cerminan pribadi aparatur dalam menjalankan pekerjaannya, baik buruknya sikap yang dilakukan oleh aparatur dapat mempengaruhi persepsi dan rasa hormat masyarakat, sikap juga dapat menjadi salah satu faktor yang meyebabkan tercapai atau tidaknya hasil kerja yang maksimal. Secara umum, pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan aparatur yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungan membina anak jalanan. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak.

Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadap-hadapan dengan objek sikap. Tekanannya pada kebanyakan penelitian

dewasa ini adalah perasaan atau emosi. Sikap yang terdapat pada diri individu akan memberi warna atau corak tingkah laku ataupun perbuatan individu yang bersangkutan. Dengan memahami atau mengetahui sikap individu, dapat diperkirakan respons ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan.

Mengenai sikap aparatur Dinas Sosial dalam pelaksanaan membina anak jalanan sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sikap aparatur, namun aparatur dihimbau untuk bersikap sopan santun dalam melaksanakan pekerjaannya tetapi tetap tegas dalam bertindak. Aparatur Dinas Sosial dituntut untuk selalu mempunyai sikap komitmen dalam melaksanakan tugas dalam membina anak jalanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Komitmen Aparatur merupakan kondisi dimana aparatur tim pembinaan adalah aparatur Dinas Sosial sendiri sangat tertarik terhadap pelaksanaan membina anak jalanan, nilai-nilai, dan sasaran dari pembinaan. Komitmen aparatur lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan tim pembinaan dan demi pencapaian tujuan dalam membina anak jalanan dengan baik. Jika sikap aparatur bertentangan dengan pandangan mereka maka proses pembinaan tidak akan berjalan dengan efektif.

Mengenai sikap RPA dalam membantu membina anak jalanan bersama pihak Dinas Sosial maupun secara mandiri, tidak ada aturan mengenai sikap, tapi pihak RPA selalu beruasaha bersikap ramah dan sopan terhadap anak jalanan yang mereka bina supaya anak jalanan tersebut lebih merasa nyaman dan percaya kepada pihak RPA dibanding harus kembali ke jalanan.

Persepsi anak jalanan mengenai sikap aparatur Dinas Sosial dalam membina. Menurut anak jalanan aparatur bersikap ramah, tetapi ada juga yang kurang ramah. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa sikap aparatur sangat beragam, ada yang memang ramah ada yang tidak, hal tersebut tergantung pada pribadinya masing-masing dan juga *mood* yang sedang dirasakan. Jadi dalam aspek sikap dalam meningkatkan mutu Kemampuan kerja belum terpenuhi dengan baik, karena masih terkendala kepribadian masing-masing para aparatur yang berbeda dan kurang menyenangkan yang dirasakan oleh anak jalanan yang dibina.

4.3.3. Keterampilan Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Keterampilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kemampuan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja seorang aparatur maka salah satu faktor penunjang adalah tingkat keterampilan aparatur itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang aparatur, maka akan dapat meningkatkan kinerja. Hasil kerja akan dapat memenuhi target dan sararan yang harus dicapai dalam pelaksanaan program membina anak jalanan apabila aparatur memiliki keterampilan yang baik dalam melaksanakan program pembinaan. Keterampilan aparatur dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Keterampilan juga membutuhkan kemampuan dasar untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berarti kemampuan

untuk mengoperasikan suatu penertiban parkir secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar dalam penertiban.

Mengenai keterampilan aparatur Dinas Sosial dalam membina anak jalanan, keterampilan aparatur dalam membina anak jalanan sudah cukup baik, pengawasan yang dilakukan oleh koordinator untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur dilapangan apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum, pembinaan dan pelatihan yang jarang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan karena kegiatan pembinaan dianggap suatu pekerjaan yang mudah meskipun tanpa pelatihan dan pembinaan yang berkala akan tetapi berajalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan oleh aparatur Dinas Sosial.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa keterampilan aparatur dalam membina anak jalanan sudah cukup baik. Aparatur terlihat sudah sangat mengerti apa yang harus dilakukan dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan telaten. Namun peneliti melihat dengan cukup terampilnya aparatur membina anak jalanan tetap saja kewalahan karena disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana. Jadi dalam aspek keterampilan dalam meningkatkan kemampuan kerja dalam membina anak jalanan cukup terpenuhi. Hanya saja sulit untuk mencapai kemajuan jika sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak ada.

4.4. Inisiatif Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Inisiatif dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencari kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan kerja untuk mencari cara kerja yang paling mudah dan paling cepat. Inisiatif ditandai dengan memiliki rasa ingin bisa, rasa ingin tahu, lebih mudah, lebih cepat, kepedulian.

Inisiatif merupakan kesesuaian antara aktivitas yang dilakuakn dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan. Kreativitas yaitu tidak menunggu kesulitan, tetapi aparatur harus sudah siap sehingga akan mudah mengatasi anak jalanan pada saat pembinaan dilakukan baik di Dinas Sosial maupun diluar Dinas Sosial.

Inisiatif merupakan salah satu dimensi penting dalam Kinerja, karena dengan adanya inisiatif dari para aparatur maka akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Dalam dimensi insisiatif, terdapat tiga aspek utama yang dapat mengukur inisiatif aparatur Dinas Sosial dalam membina anak jalanan, aspek tersebut antara lain adalah, aspek Kepedulian, tanggungjawab, dan kemauan.

Dimensi insiatif memiliki tiga aspek penting yaitu kepedulian, tanggungjawab dan kemauan. Aspek kepedulian masih belum terpenuhi secara maksimal, hal tersebut ditunjukan oleh kurangnya aparatur yang bertugas untuk membina dan jarangnya sosialisasi dilakukan kepada masyrakat. Berdasarkan aspek tanggungjawab, tanggung jawab Dinas Sosial Kota Bandung dalam membina anak jalanan sudah cukup baik walaupun masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi. Aspek kemauan cenderung

mengarah ke arah positif, hal tersebut ditunjukan oleh kemauan Dinas Sosial untuk terus berkerja dalam membina anak jalanan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti LSM, RPA dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dimensi inisiatif dalam mendukung kinerja aparatur dinas Sosial dalam melakukan penertiban masih berjalan kurang optimal untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.4.1. Kepedulian Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kepedulian merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi inisiatif Dinas Sosial dalam pelaksanaan membina anak jalanan. Melalui aspek kepedulian, akan dapat terlihat sejauh mana kepedulian aparatur terhadap pekerjaannya dan juga kepedulian Dinas Sosial terhadap anak jalanan. Kepedulian terhadap keakuratan tujuan adalah dorongan untuk mengurangi ketidakpastian dalam suatu lingkungan. Hal ini tampak dalam bentuk pemanatauan dan pemeriksaan pekerjaan dan menekankan pada kejelasan peran,

Mengenai kepedulian Dinas Sosial dalam membina anak jalanan, kepedulian aparatur terhadap anak jalanan cukup baik, hal ini ditunjukan dengan pelaksanaan program pembinaan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Hanya saja anak jalanan yang dilibatkan dalam program pembinaan masih minim, jumlah anak setiap pembinaan dilaksanakan sebanyak 150 anak. Sedangkan jumlah anak jalanan yang ada di Kota Bandung jumlahnya mencapai 2000 lebih. Pemahaman

tentang tujuan dari pelaksanaan pembinaan anak jalanan tersebut juga menambah aspek kepedulian aparatur Dinas Sosial.

Mengenai kepedulian aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas membina anak jalanan yang sangat berpengaruh terhadap membina anak jalanan itu sendiri, kepedulian aparatur terhadap anak jalanan ditunjukan dengan upaya membantu anak jalanan agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak kembali lagi hidup dijalanan. Namun keterbatasan dana dan SDM merupakan kendala bagi Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang maksismal kepada para anak jalanan yang dibina.

Kepedulian aparatur Dinas Sosial dalam pelaksanaan membina anak jalanan masih belum maksimal, hal tersebut ditunjukan dengan masih adanya beberapa aparatur yang tidak ikut bertugas membina anak jalanan di kantor Dinas Sosial maupun saat pelaksanaan pembinaan dilaksanakan diluar Dinas Sosial. Dapat disimpulkan dari aspek kepedulian dalam mengukur inisiatif kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam membina anak jalanan masih belum maksimal.

4.4.2. Tanggung Jawab Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Tanggung Jawab merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi inisiatif, berhasil atau tidaknya kinerja pegawai dapat diukur dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki pegawai atau aparatur terhadap pekerjaannya.

Aparatur Dinas Sosial memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membina anak jalanan, maupun dalam penertiban anak jalanan tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab tehadap pekerjaan maupun tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Mengenai tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan membina anak jalanan, Aparatur Dinas Sosial bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan melayani masyarakat. Sesudah kegiatan penjaringan oleh tim penertiban akan diteruskan untuk proses pendataan PMKS, kemudian dialanjutkan pembinaan singkat terhadap PMKS melalui sosialisasi di kantor Dinas Sosial kemudian dipulangkan kembali.

Aparatur selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, dan aparatur bertanggung jawab juga atas setiap tindakan yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya dilakukan melalui ketegasan memberi dan menerima sanksi apabila ada pelanggaran.

Mengenai bentuk tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugasnya ditunjukan dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak jalanan saat membina, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk tidak memberi uang kepada anak jalanan.

Pihak RPA memiliki persepsi bahwa tanggung jawab dari Dinas Sosial dirasa masih kurang, karena pelaksanaan pembinaan melibatkan sedikit anak jalanan. Program yang dilakukan Dinas Sosial dirasa kurang tepat sasaran oleh pihak RPA.

Kurangnya komunikasi dengan pihak RPA menjadi salah satu alasan yang membuat pihak RPA merasa tidak terlalu banyak dilibatkan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa Dinas Sosial sudah cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membina anak jalanan, namun perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intens dengan pihak RPA dan juga masyarakat.

4.4.3. Kemauan Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kemauan merupakan dorongan secara pribadi yang muncul dari diri sesorang untuk bertidak atau melakukan sesuatu seperti rasa ingin bisa, rasa ingin tahu lebih mudah dan lebih cepat dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan. Kemauan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajiban, merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung keberhasilan kinerja.

Mengenai kemauan Dinas Sosial untuk melaksanakan pekerjaannya dalam membina anak jalanan, semangat dan kemauan aparatur Dinas Sosial cukup besar, di setiap Tim dibentuk juga koordinator untuk memonitor kinerja aparatur di lapangan. Selanjutnya kemauan dari aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya selalu senantiasa dipupuk dengan diberinya motivasi-motivasi secara langsung maupun tidak langsung oleh kepala bidang tim.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, tim penjaringan hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi dari koordinator tim, disini

menuntut koordinator tim harus lebih bisa berinisiatif dalam menciptakan solusi-solusi baru dalam menjaring anak jalanan namun pada kenyataannya kegiatan penjaringan hanya terfokus pada instruksi dari atasan. Permasalahan yang tak kalah penting seperti melakukan penjaringan terhadap orang yang menguasai anak-anak jalanan atau sebagai tuannya yang memaksa anak jalanan meminta-minta pengendara di jalanan Kota Bandung belum dilaksanakan.

Diketahui bahwa aspek kemauan Dinas Sosial untuk melaksanakan pekerjaannya cukup baik sesuai dengan instruksi koordinator tim namun kemauan koordinator tim dalam melakukan inisiatif baru untuk menciptakan solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak kalah penting masih belum di optimalkan. Penjaringan dilakukan hanya saja masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan masih kembali laginya anak-anak ke jalanan.

4.5. Komunikasi Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Komunikasi kerja dapat diartikan adalah hubungan kerja antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan untuk memudahkan proses kerja. Komunikasi dalam membina anak jalanan tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak atau satu unit kerja tertentu saja. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam membina anak jalanan, karena antara Dinas Sosial, Satpol PP, RPA, LSM dan Masyarakat harus berkerja sejalan supaya menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam mengukur dimensi komunikasi terdapat tiga aspek penting yang dapat menjadi ukuran baik tidaknya komunikasi kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Pelaksanaan membina anak jalanan. Ketiga Aspek tersebut antara lain adalah kerjasama, hubungan kerja, dan keharmonisan.

Dalam pengukuran kinerja, komunikasi merupakan dimensi salah satu dimensi yang paling penting. Dalam dimensi komunikasi terdapat tiga aspek penting yaitu kerjasama, hubungan kerja dan keharmonisan. Aspek kerjasama dan hungan kerja antara Dinas Sosial dengan pihak lain terjalin dengan baik. aspek keharmonisan cenderung baik namun perlu ditingkatkan keharmonisan dengan masyarakat. Berdasarakan aspek–aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi telah tercapai dengan cukup baik walaupun ada keharmonisan dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

4.5.1. Kerjasama Dinas Sosial Dengan SKPD Terkait Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Kejasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Setiap individu yang bekerja memiliki keterbatasan, maka dibutuhkanlah kerjasama dalam tim untuk dapat saling melengkapi sehingga tujuan dan hasil kinerja akan dapat dicapai.

Mengenai kerjasama aparatur Dinas Sosial dalam membin anak jalanan, aparatur Dinas Sosial menjelaskan dalam pelaksanaan penjaringan Dinas Sosial

melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Satpol PP Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung. Untuk pembinaannya sendiri Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak RPA serta ibu-ibu PKK karena menurut Dinas Sosial ibu-ibu PKK lebih mengerti dengan anak jalanan. Kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat yang membantu menjaring anak-anak jalanan yang kemudian di serahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandung. Selanjutnya Dinas Sosial menindak lanjuti laporan dari masyarakat kemudian memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada anak jalanan.

Membina anak jalanan terlihat ada kerjasama antara Dinas Sosial dengan apararat-aparat pemeritahan lainnya sperti seperti Satpol PP Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, Pihak RPA, ibu-ibu PKK, serta Masyarakat dan dalam aspek kerjasama aparatur Dinas Sosial telah bisa dinilai baik dalam memenuhi dimensi komunikasi.

4.5.2. Hubungan Kerja Aparatur Dinas Sosial Dalam Membina Anak Jalanan di Kota Bandung

Hubungan Kerja merupakan bagaimana tata cara maupun aturan dalam bekerja sama. Hubungan kerja yang baik anatar pihak-pihak terkait tentu akan dapat menunjang keberhasilan kinerja. Hubungan kerja dapat disebut juga sebagai hubungan professional. Hubungan kerja antar aparatur maupun dengan pihak lainnya terjalin dengan baik, masing-masing pihak mengerti tugas dan wewenangnya masing-masing dan juga menghormati tugas dan wewenang rekannya.

Hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait berlangsung dengan baik dan professional. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat bahwa hubungan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan membina anak jalanan berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukan oleh pembagian tugas yang jelas dan berdasarkan prosedur.

Tim penjaringan gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung, dan Polisi yang melakukan penjaringan terhadap anak jalanan, gepeng, dan PMKS lainnya. Setelah proses penjaringan selesai selanjutnya para anak jalanan dan PMKS lainnya dibawa ke Kantor Dinas Sosial Kota Bandung untuk mendapatkan pendataan dan sosialisasi dari Dinas Sosial. Kemudian setelah proses pendataan dan sosialisasi selesai anak jalanan di berikan kepada RPA yang sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung untuk selanjutnya mendapat pembinaan. Dari Proses tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan membina anak jalanan terjalin dengan baik.

4.5.3. Keharmonisan Dinas Sosial Menjalin Kerjasama Dengan SKPD Terkait Dalam Membina Anak Jalanan

Keharmonisan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi komunikasi. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila antar aparatur atau pegawai memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan kinerja.

Mengenai keharmonisan antar Dinas Sosial dalam membina anak jalanan, keharmonisan hubungan antar sesama aparatur dan juga antar pihak lain terjalin dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi yang baik dan juga hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan disaat penyusunan kerja.

Hubungan kerja antar semua pihak terkait terjalin dengan harmonis, selalu berusaha untuk menjaga kekompakan. Keharmonisan antar sesama aparatur dan pihak-pihak apartur pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan membina anak jalanan terjalin dengan baik, namun keharmonisan tersebut tidak berlaku untuk sebagian pihak RPA, sebagian pihak RPA sering mengeluhkan tindakan Dinas Sosial Kota Bandung yang melaksanakan program membina anak jalanan kurang dilibatkan dan menurut pihak RPA ada beberapa program pembinaan yang kurang tepat sasaran. Dalam aspek kerjasama dalam mendorong dimensi komunikasi di dalam membina anak jalanan masih harus ditingkatkan terutama dengan pihak RPA dan masyarakat.